

PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI NUSA TENGGARA BARAT

IDA BAGUS EKA ARTIKA¹⁾, IDA AYU KETUT MARINI²⁾

¹⁾Prodi Manajemen K. Mataram, Unmas Denpasar

²⁾Prodi Agribisnis K. Mataram, Unmas Denpasar

¹⁾idabagusekaartika@unmas.ac.id, ²⁾idaayuketutmarini@unmas.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor riil yang menghasilkan produk (barang maupun jasa), yang secara langsung akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Sektor ini memerlukan dukungan peran aktif industri jasa keuangan, yaitu jasa perbankan. Kajian tentang Peranan BPR dalam meningkatkan kegiatan UMKM dilakukan di wilayah kerja Bank Indonesia Mataram, yaitu Propinsi Nusa Tenggara Barat, berupa kajian pustaka terhadap data-data publikasi yang terkait. Dari hasil kajian, nilai kredit untuk UMKM yang disalurkan oleh industri perbankan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sampai dengan akhir tahun 2022, berjumlah Rp. 19,474431 trilyun yang terdiri dari kredit modal kerja sejumlah Rp. 16,548945 Trilyun dan kredit investasi Rp. 2,925486 triliun . Dari seluruh kredit UMKM yang disalurkan tersebut, Bank Perkreditan Rakyat rata-rata hanya menyalurkan sebesar 7,36 persen dari kredit UMKM yang disalurkan. Kredit ini disalurkan oleh 28 unit BPR di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari 115 kantor pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Melihat peranan BPR dalam menyalurkan kredit UMKM yang masih relatif kecil, berarti BPR harus terus memperkuat posisinya, untuk meningkatkan peranannya sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat menopang usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata kunci : lembaga keuangan mikro, usaha kecil, menengah dan mikro, kredit modal kerja, kredit investasi , kredit konsumsi.

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprise (MSME) activities are the real sector that produces products (goods and services), which will directly drive the economic wheels of society in a region. This sector requires support from the active role of the financial services industry, namely banking services. A study on the role of BPRs in improving MSME activities was carried out in the Bank Indonesia Mataram working area, in West Nusa Tenggara Province, in the form of a literature review of related published data. From the results of the study, the value of credit for MSMEs distributed by the banking industry in the West Nusa Tenggara Province region, until the end of 2022, amounts to IDR. 19.474431 trillion consisting of working capital credit amounting to Rp. 16.548945 trillion and investment credit Rp. 2.925486 trillion . Of all the MSME loans disbursed, Rural Banks on average only distributed 7.36 percent of the MSME loans disbursed. This credit was distributed by 28 BPR units in the West Nusa Tenggara region, consisting of 115 service offices spread throughout the West Nusa Tenggara region. Seeing that BPR's role in channeling MSME credit is still relatively small, this means that BPR must continue to strengthen its position, to increase its role as a microfinance institution that can support micro, small and medium enterprises in the West Nusa Tenggara Province region.

Keywords: micro financial institutions, small, medium and micro businesses, working capital credit, investment credit, consumption credit.

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan institusi penting dalam menopang kegiatan perekonomian masyarakat. Semakin tinggi dan kompleks aktivitas ekonomi masyarakat, peranan lembaga perbankan juga semakin meningkat. Kemantapan sistem perbankan di suatu negara merupakan salah satu pilar kekuatan dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam negara tersebut. Sebagai lembaga perantara di bidang keuangan (*financial*

intermediary) peranan bank sangat strategis dalam menggerakkan sektor perekonomian, khususnya sektor riil di masyarakat. Sektor riil merupakan sektor produksi yang menghasilkan produk (barang maupun jasa), yang secara langsung akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, khususnya pelaku kegiatan produksi, memerlukan peran aktif industri jasa keuangan, yaitu jasa perbankan, karena industri perbankan akan memberikan kontribusi positif berupa jasa pembiayaan (kredit) terhadap kegiatan-kegiatan produktif masyarakat.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Denda Wijaya, 2005). Ada banyak jenis kredit yang disalurkan oleh industri perbankan kepada masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun non produktif (konsumtif). Menurut Bank Indonesia, dilihat dari jenis penggunaannya ada tiga, yaitu :

- a. Kredit Modal Kerja adalah pemberian pinjaman jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur/nasabah yang bersangkutan.
- b. Kredit Investasi adalah pemberian pinjaman jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.
- c. Kredit konsumsi adalah pemberian pinjaman untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa ataupun yang lainnya.
- d. Menurut Bank Indonesia, dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, kredit mikro, kecil dan menengah didefinisikan sebagai berikut :
 - 1) Kredit Mikro adalah kredit atau pembiayaan dari bank kepada nasabah dengan plafon kredit keseluruhan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau equivalent.
 - 2) Kredit Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank kepada nasabah dengan plafon kredit keseluruhan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau equivalent.
 - 3) Kredit Menengah adalah kredit atau pembiayaan dari bank kepada nasabah dengan plafon kredit keseluruhan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau equivalent.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu bentuk badan usaha bank yang diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan, pada pasal 1 ayat 4, yang menyatakan : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat 28 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) , yang terdiri dari BPR milik swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan BPR milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD), dengan kantor-kantor cabang yang menyebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat sejumlah 115 kantor Cabang (Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Januari 2023)

Dalam rangka menggerakkan sektor riil di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), industri perbankan selama 5 tahun terakhir telah menyalurkan kredit bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

Tabel 1 : Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan Perbankan di wilayah Nusa Tenggara Barat, tahun 2018 – 2022 (Rp. Juta)

No	Jenis Kredit	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mikro	4.052.358	4.684.501	4.898.994	6.883.109	9.310.924
2	Kecil	4.511.582	5.287.038	6.026.070	7.731.647	7.195.157
3	Menengah	4.038.774	4.426.731	4.922.344	3.378.576	2.968.349
	T o t a l	12.602.714	14.398.270	15.847.408	17.993.333	19.474.431

Sumber : Kantor Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi NTB, Januari 2023.

Posisi kredit yang diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang disalurkan di atas dilaksanakan oleh seluruh industri perbankan yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari bank-bank umum milik pemerintah, bank swasta nasional, bank asing dan bank campuran serta bank perkreditan rakyat (BPR). Dari perkembangan posisi kredit UMKM selama 5 tahun terakhir, khususnya kredit untuk usaha mikro cenderung terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2018 kredit yang tersalurkan senilai Rp. 4,052358 triliun meningkat menjadi Rp. 9,310924 triliun pada tahun 2022. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap perkembangan usaha mikro yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan untuk kredit usaha kecil selama 3 tahun mengalami peningkatan, tetapi dari tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan realisasi kredit yang disalurkan oleh perbankan. Demikian juga untuk kredit usaha menengah, terdapat penurunan realisasi kredit dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun secara keseluruhan, kredit yang disalurkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cenderung mengalami peningkatan, dari Rp. 12,602714 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 19,474431 triliun pada tahun 2022, yang menandakan bahwa kegiatan perekonomian atau sector rumah tangga produksi di wilayah Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang positif walaupun terdapat wabah Covid 19 melanda pada tahun 2020 dan 2021 yang mempengaruhi pelemahan ekonomi secara global.

Dari uraian pada latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dan kajian tentang seberapa besar peranan BPR dalam menggerakkan sektor riil yang direpresentasikan dengan penyaluran kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah, khususnya terhadap penyaluran kredit dalam bentuk modal kerja dan kredit investasi.

Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan BPR dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat yang ditunjukkan dengan kemampuannya menyalurkan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi ?.
2. Bagaimana kecenderungan peranan BPR dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir ?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui peranan BPR dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat
- 2) Untuk melihat kecenderungan peranan BPR dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi pengelola BPR maupun pihak pemerintah dalam kegiatan pengambilan keputusan.
- 2) Sebagai referensi bagi pihak terkait, untuk menggali berbagai persoalan untuk dipecahkan dalam rangka memperkuat lembaga BPR dalam menunjang Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang tertuju pada penggambaran suatu masalah yang ada pada waktu sekarang berdasar pada cara pengumpulan data, menyusunnya, menjelaskannya, menganalisis dan menarik kesimpulan (Surakhmad, 2008, 139). Menurut Travers dalam Umar (2000, 22) metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Bank Indonesia Mataram, yaitu Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya menyangkut penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah oleh Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat pada periode 2018 sampai dengan 2022.

Metode pengumpulan data adalah metode kasus, yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Nazir, 1998, 66). Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian ini melalui kepustakaan atau publikasi-publikasi data terkait.

Metode analisis data dilakukan dengan cara deskripsi tabel silang (*crosstab analysis*) yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sesuai dengan pemecahan masalah yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data publikasi tentang penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh seluruh perbankan di Nusa Tenggara Barat, dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan Kredit UMKM yang disalurkan Perbankan di NTB

Kredit yang disalurkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari jenis penggunaannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Datanya dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan penggunaannya yang disalurkan Perbankan di wilayah Nusa Tenggara Barat, tahun 2018 – 2022 (Rp. Juta)

Tah	Modal Kerja	Perkembangan (%)	Investasi	Perkembangan (%)
2018	9.942.794	-	2.659.920	-
2019	11.482.720	15,49	2.915.549	9,61
2020	12.906.364	12,40	2.941.044	0,87
2021	15.096.795	16,97	2.896.538	(1,51)
2022	16.548.945	9,62	2.925.486	0,99
Rerata	-	13,62	-	2,49

Sumber : Kantor Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi NTB Januari 2023.

Sesuai dengan data tabel 2, kredit yang disalurkan dilihat dari dua kelompok penggunaan, yaitu untuk modal kerja dan investasi, secara umum terlihat bahwa perbankan di Nusa Tenggara Barat, selama 5 tahun terakhir cenderung lebih banyak menyalurkan kredit modal kerja dibandingkan kredit investasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah, yang berarti bahwa pembiayaan sektor riil untuk modal kerja permintaannya lebih tinggi dibandingkan dengan kredit investasi. Fenomena ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memang masih dominan memerlukan modal kerja, dibandingkan dengan pembiayaan investasi dalam kegiatan usahanya.

Dilihat dari perkembangan masing-masing jenis kredit yang disalurkan, ternyata perkembangan kredit modal kerja juga menunjukkan perkembangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kredit investasi, di mana perkembangan kredit modal kerja rata-rata meningkat 13,62 % setahun, sedangkan kredit modal kerja cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, malah pada tahun 2021 terjadi perkembangan negatif sebesar -1,51 % dibanding tahun 2020. Rata-rata perkembangan kredit investasi di sector UMKM per tahun adalah 2,49 %.

Perkembangan Kredit UMKM yang disalurkan BPR di Nusa Tenggara Barat

Bank Perkreditan Rakyat, selaku lembaga keuangan mikro yang paling dekat dengan pihak pengusaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat besar dalam melakukan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya dalam membiayai modal kerja dan juga investasi. Dalam 5 tahun terakhir, data pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah terkait jenis pemanfaatannya ditunjukkan dalam tabel 3 :

Tabel 3 : Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan oleh BPR di wilayah NTB, tahun 2018 – 2022 (Rp. Juta)

Tahun	Modal Kerja	Perkembangan (%)	Investasi	Perkembangan (%)
2018	802.840	-	112.143	-
2019	919.809	14,57	208.265	85,71
2020	1.050.089	14,16	180.420	(13,37)
2021	1.203.483	14,61	135.167	(25,08)
2022	1.419.904	17,98	169.905	25,70
Rerata	-	15,33	-	18,24

Sumber : Kantor Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi Keuangan Propinsi NTB, Januari 2023.

Khusus untuk penyaluran kredit bagi UMKM oleh BPR yang diperlihatkan dalam tabel 3, perkembangan kredit modal kerja dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan perkembangan rata-rata 15,33 % per tahun, di mana terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 14,57 % turun menjadi 14,16 %. Selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terjadi peningkatan yaitu sebesar 14,61 % dan 17,98 %. Sedangkan pada kredit investasi, kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun, di mana pada awalnya meningkat dari Rp. 112,143 milyar menjadi Rp. 208,265 milyar pada tahun 2018 ke tahun 2019, atau meningkat 85,71 %, kemudian selama 2 tahun berikutnya terus menurun, di mana dari tahun 2020 ke tahun 2021 turun sebesar 13,37 % dan daritahun 2020

ke tahun 2021 menurun lagi sebesar 25,08 %. Sedangkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 25,70%. Penurunan pembiayaan untuk investasi pada tahun 2020 dan 2021 kemungkinan ada kaitannya dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat pengaruh wabah Covid 19 yang masih melanda seluruh wilayah di Indonesia saat itu.

Secara umum terlihat bahwa BPR dalam menyalurkan kredit masih mempertimbangkan produktivitas dalam pembiayaannya, sehingga kecenderungan untuk menggerakkan sektor usaha produktif lebih bagus dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Kecenderungan kredit yang disalurkan BPR ada pada pembiayaan modal kerja, yang mengambil pola jangka waktu yang lebih pendek, sehingga kredit dapat lebih cepat selesai. Kredit investasi, karena jangka waktunya yang relatif panjang, kurang menarik bagi pihak BPR untuk menyalurkannya.

Peranan BPR Dalam Menggerakkan Sektor UMKM

Jika dilihat dari peranan BPR dalam menggerakkan sector UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat, maka secara keseluruhan peranan BPR masih perlu ditingkatkan di masa-masa mendatang, di mana BPR hanya mengambil porsi atau peranan rata-rata sekitar 7,69 % dari keseluruhan kredit yang tersalur di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 : Peranan BPR dalam Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah NTB, tahun 2018 – 2022 (Rp. Juta)

Tahun	Total Kredit UMKM	Total Kredit BPR	Kontribusi (%)
2018	12.602.714	914.983	7,26
2019	14.398.270	1.128.074	7,83
2020	15.847.408	1.230.509	7,76
2021	17.993.333	1.338.650	7,44
2022	19.474.431	1.589.809	8,16
Rerata	-	-	7,69

Sumber : Kantor Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi NTB, Januari 2023.

Peranan BPR dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah NTB selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 bisa dilihat dari kontribusi kredit UMKM yang disalurkan oleh BPR dibandingkan total kredit UMKM yang disalurkan oleh industry perbankan di NTB, dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,69 % setiap tahunnya, yaitu masih relative kecil karena kurang dari 10 % dari keseluruhan krediyang disalurkan kepada UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara rinci, dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan dari 7,26 % menjadi 7,83 %, namun tahun 2020 turun menjadi 7,76 % dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 7,44 %. Namun pada tahun 2022 ada peningkatan menjadi 8,16 %. Kecenderungan penurunan peranan BPR dalam menyalurkan kredit kepada UMKM pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh adanya kelesuan kegiatan perekonomian akibat terjadinya wabah Covid-19. Namun setelah wabah terlewatkan, tahun 2022 kegiatan perekonomian, khususnya sector UMKM mulai menggeliat, sehingga kontribusi penyaluran kredit UMKM oleh BPR di wilayah NTB kembali meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait, agar BPR di masa mendatang dapat lebih meningkatkan perannya dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat.

PENUTUP

Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan antara lain adalah :

- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan positif dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat, walaupun peranannya relative masih kecil yaitu di bawah 10 %.
- Terdapat kecenderungan penurunan peranan BPR dalam kontribusinya menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya wabah Covid 19, yang mempengaruhi kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, namun pada tahun 2022 peranan BPR meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan usaha kecil mikro dan menengah pasca wabah Covid 19.

Saran

- Pihak BPR perlu terus meningkatkan peranannya dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam pembiayaan yang bersifat produktif, seiring dengan kembali aktifnya kkegiatan sector usaha mikro, kecil dan menengah pasca wabah Covid 19.

- b. Pihak terkait diharapkan terus mendorong BPR untuk meningkatkan pembiayaan di bidang investasi, mengingat kredit investasi akan memberikan efek lebih luas, khususnya dalam pembukaan lapangan kerja di sector usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha perlu memberikan dukungan kepada BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., (2000). Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bank Indonesia Mataram. (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Vol. 23, Nomor 01, Januari 2023.
- Dendawijaya, Lukman, Ir, MM. (2015). Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Indonesia.
- Nazir Moh., (1998). Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian , Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Surakhmad, Winarno., (2008). Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik, Penerbit Tarsito Bandung.
- Suyatno, Thomas, dkk., (2001). Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Umar, Husein. (2000). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.